

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Agensi**

Pada teori yang dikemukakan, Michael C. Jensen dan William H. Meckling mengembangkan teori keagenan. Teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik primer dan pemilik sekunder. Di mana kedua belah pihak memiliki fokus yang berbeda sehingga menyebabkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena ketidakseimbangan informasi, di mana manajemen lebih banyak memperoleh informasi dibandingkan pemilik perusahaan. Untuk meminimalisir konflik tersebut, dibutuhkan mekanisme pengawasan seperti keberadaan Dewan Komisaris Independen, sistem insentif, serta transparansi laporan keuangan. Jensen dan Meckling mengartikan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana pemilik mendeklasikan wewenang kepada manajer untuk mengambil keputusan atas nama mereka. Namun, karena masing-masing individu dianggap sebagai aktor yang rasional dan oportunistis, maka manajer mungkin akan mengambil tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri, bukan pemilik modal. Oleh karena itu, diperlukan sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) untuk menyeimbangkan hubungan ini dan memastikan bahwa manajer bertindak demi kepentingan pemilik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Michael C. Jensen and William H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure,” *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 305–360.

## B. Teori Legitimasi

Teori legitimasi diperkenalkan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975. Konsep legitimasi menekankan bahwa keberlangsungan organisasi sangat tergantung pada kesesuaianya dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat dan beroperasi. Legitimasi ini merupakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan, kegiatan, dan output organisasi dapat diterima sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Dowling dan Pfeffer, legitimasi sosial sangat penting terutama bagi perusahaan yang aktivitas operasionalnya berdampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, teori legitimasi merupakan komponen penting dari tanggung jawab sosial dan praktik akuntansi hijau dari bisnis. Bisnis dapat memanfaatkan kegiatan sosial dan lingkungan sebagai bentuk upaya mempertahankan legitimasi di mata publik. Apabila terjadi gap antara nilai organisasi dan nilai sosial, maka perusahaan akan melakukan legitimasi ulang melalui strategi komunikasi, seperti pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan.

## C. Teori Sinyal

Teori sinyal diperkenalkan oleh Michael Spence pada tahun 1973 dan awalnya dikembangkan dalam konteks ekonomi tenaga kerja. Namun, dalam perkembangannya, teori ini juga banyak digunakan dalam konteks keuangan dan akuntansi.<sup>4</sup> Teori ini menjelaskan pihak yang memiliki informasi dapat

---

<sup>2</sup> John Dowling and Jeffrey Pfeffer, “Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior,” *Pacific Sociological Review* 18, no. 1 (1975): 122–136.

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Michael Spence, “Job Market Signaling,” *The Quarterly Journal of Economics* 87, no. 3 (1973):

mengirimkan sinyal kepada pihak luar untuk mengurangi kesenjangan informasi tersebut.

Dalam konteks perusahaan, manajer, sebagai pemangku kepentingan internal, dapat memberikan informasi kepada investor dengan memberikan rincian dalam laporan akhir tahun atau jangka panjang. Sinyal yang dikirimkan bisa berupa informasi mengenai kinerja keuangan, praktik *good corporate governance*, dan aktivitas sosial-lingkungan. Informasi tersebut bertujuan untuk meyakinkan investor bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan layak untuk dijadikan tempat investasi.<sup>5</sup>

Sinyal positif seperti transparansi pelaporan *green accounting* atau keberadaan Dewan Komisaris Independen yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan nilai perusahaan., serta memperkuat posisi perusahaan di pasar modal.<sup>6</sup> Oleh karena itu, teori sinyal sangat relevan dalam menjelaskan motivasi perusahaan dalam menyampaikan informasi yang bersifat sukarela kepada publik.

#### **D. Dewan Komisaris Independen**

Menurut UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 yang diartikan dengan komisaris dewan adalah suatu organ perseroan yang membantu dalam menetapkan tugas untuk melaksanakan pengawasan, baik secara umum maupun khusus sesuai dengan dasar anggaran dan memberikan

---

355–374.

<sup>5</sup> I F P Utomo, “Pengaruh *Good corporate governance* terhadap Kinerja Lembaga Perbankan tahun 2014-2018,” *BISECER (Business Economic Entrepreneurship ... III*, no. 02 (2020): 1–15.

<sup>6</sup> Ibid

nasehat kepada langsung. Utomo berpendapat bahwa Dewan Komisaris Independen memiliki arti bagian dari dewan komisaris yang tidak etihad kaitan terdapat kemampuan dalam bertindak independen.<sup>7</sup>

Pengukuran Dewan Komisaris Independen merupakan bagian dari total anggota dewan komisaris pada perusahaan. Menurut UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 108 Ayat 5 memaparkan perseroan dengan kegiatan usaha dengan menghimpun dana serta mengelola dana masyarakat, perseroan penerbit surat hutang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai minimal dua orang anggota dewan komisaris. Jumlah ini di presentasikan dengan paling kurang 30% Dewan Komisaris Independen dari jumlah seluruh dewan komisaris berasal dari dalam perusahaan dan satu di antaranya diangkat sebagai presiden dewan komisaris.<sup>8</sup> Secara umum, persentase Dewan Komisaris Independen dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total jumlah dewan komisaris}} \times 100\%$$

Rumus ini digunakan untuk menilai sejauh mana komposisi Dewan Komisaris Independen dalam struktur tata kelola perusahaan. Semakin tinggi persentase Dewan Komisaris Independen, maka semakin besar pula indikasi bahwa perusahaan menerapkan prinsip *good corporate governance*, khususnya dalam aspek pengawasan dan independensi pengambilan

---

<sup>7</sup> I F P Utomo, "Pengaruh *Good corporate governance* terhadap Kinerja Lembaga Perbankan tahun 2014-2018," *BISECER (Business Economic Entrepreneurship ... III*, no. 02 (2020): 1–15.

<sup>8</sup> Toto Suwarsa dan Aicha Rahmadani Hasibuan, "Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan periode 2018-2020," *Jurnal Akuntansi* 14, no. 2 (2021): 71–85.

keputusan. Dewan Komisaris Independen berperan dalam mengawasi jalannya operasional manajemen agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, tanpa adanya konflik kepentingan.

## E. *Green Accounting*

### 1. Pengertian *Green Accounting*

Menurut Yakhou dan Dorweiler, *green accounting* merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya lingkungan yang diintegrasikan dalam pengambilan keputusan ekonomi perusahaan, sehingga mendorong akuntabilitas atas dampak lingkungan yang ditimbulkan.<sup>9</sup> *Green accounting* atau dikenal juga dengan akuntansi hijau merupakan jenis akuntansi yang bertujuan untuk meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan memasukkan biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan yang berguna untuk pengembangan keputusan internal maupun eksternal. mereka yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kualitas yang buruk.<sup>10</sup>

Terkait dengan manajemen keuangan dari konsekuensi lingkungan, *Green accounting* mencakup sejumlah tujuan yang signifikan, seperti:

1. Menilai biaya dan manfaat lingkungan dari suatu kegiatan atau kebijakan, guna lebih memahami dampak ekonomi dari intervensi lingkungan tertentu.

---

<sup>9</sup> Yakhou, Mehenna, dan Vernon P. Dorweiler. "Environmental Accounting: An Essential Component of Business Strategy." *Business Strategy and the Environment* 13, no. 2 (2004): 65–77

<sup>10</sup> Ziral Raditya Aziz dan Masiyah Kholmi, "Pengaruh *Green accounting* dan Corporate Social Responsibility terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada Perusahaan Energi Sub Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019 – 2021)" 23, no. 246 (2024): 54–63.

2. *Green accounting* memudahkan untuk membedakan dan mengategorikan berbagai biaya lingkungan, termasuk biaya yang terkait dengan pengelolaan, pencegahan, dan restorasi lingkungan. Perusahaan dapat menggunakan hal ini untuk menentukan komponen biaya lingkungan tertentu dan membuat keputusan yang lebih baik.
3. Membentuk hubungan keuangan antara neraca, lingkungan dan sumber daya fisik. Hal ini menyiratkan bahwa faktor-faktor yang nyata, seperti emisi atau penggunaan air, dapat dikonversi ke dalam nilai uang. Informasi ini kemudian dapat dimasukkan ke dalam catatan keuangan dan membantu menentukan nilai aset dan kewajiban lingkungan perusahaan.<sup>11</sup>

## 2. Pengertian Biaya Lingkungan

Menurut Hansen dan Mowen (2005), biaya lingkungan mencakup seluruh pengeluaran yang timbul untuk mencegah, mendekripsi, maupun memperbaiki dampak negatif lingkungan akibat aktivitas operasional perusahaan. Biaya ini menjadi bagian penting dalam *green accounting* karena menunjukkan tingkat tanggung jawab perusahaan terhadap kelestarian lingkungan hidup.<sup>12</sup> Biaya-biaya ini dapat bersifat langsung, seperti biaya yang diperlukan untuk membeli dan menyiapkan peralatan khusus untuk mengendalikan polusi untuk menjaga udara, air, atau tanah tetap bersih.

---

<sup>11</sup> Chairia Chairia et al., “Implementasi *Green accounting* (Akuntansi Lingkungan) di Indonesia: Studi Literatur,” *Financial: Jurnal Akuntansi* 8, no. 1 (2022): 40–49.

<sup>12</sup> Don R. Hansen dan Maryanne M. Mowen, *Managerial Accounting*, 7th ed. (Mason, OH: South-Western College Publishing, 2005), 505

Selain itu, terdapat biaya-biaya tidak langsung, seperti biaya yang terkait dengan langkah-langkah perbaikan lingkungan, membayar denda yang dikenakan karena melanggar hukum lingkungan yang berlaku. Dedikasi perusahaan untuk menjunjung tinggi kelestarian lingkungan dengan tetap mematuhi persyaratan hukum tercermin dalam biaya lingkungan.

Untuk mengevaluasi atau menilai laporan keuangan dan kinerja perusahaan secara menyeluruh, *green accounting* berupaya untuk menyajikan informasi untuk berbagai pihak. *Green accounting* juga membantu dalam menilai risiko, potensi pengembangan, dan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, dengan menawarkan data menyeluruh tentang seberapa efektif manajemen menjalankan usaha yang bertanggung jawab secara ekologis dan sosial, *green accounting* memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami seberapa besar dedikasi perusahaan terhadap kebijakan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.<sup>13</sup>

*Green accounting* dapat dihitung dengan menggunakan rumus biaya lingkungan sebagai berikut:

$$\text{Biaya lingkungan} = \frac{\text{Biaya lingkungan}}{\text{Laba bersih}}$$

## F. Nilai Perusahaan

### 1. Pengertian Nilai Perusahaan

Menurut Bambang Sugeng, nilai perusahaan adalah nilai yang dapat dilihat dari fluktuasi perubahan harga nilai saham jika harga saham naik.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Lako and Sumaryati, Kerangka Konseptual dan Aplikasi Akuntansi Hijau.

<sup>14</sup> Bambang Sugeng, "Pengaruh ROE, DER, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan"

Sebaliknya, jika harga saham turun, nilai perusahaan juga akan turun.

Darmadji dan Fakhrudin menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat diukur melalui berbagai indikator, salah satunya adalah rasio *Tobin's Q*. Rasio ini memberikan perkiraan pasar keuangan saat ini dari laba atas investasi per dolar investasi. Rasio ini mencerminkan bagaimana pasar menilai perusahaan dibandingkan dengan nilai buku asetnya.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Sudiyanto dan Puspitasari menyatakan bahwa *Tobin's Q* mencerminkan nilai yang lebih rasional karena memperhitungkan aset tak berwujud. Apabila investor beranggapan informasi tersebut suatu hal yang baik, maka akan berdampak kepada meningkatnya nilai perusahaan serta diiringi dengan meningkatnya harga saham.<sup>16</sup>

## **2. Perhitungan nilai perusahaan menggunakan *Tobin's Q***

Berikut Rumus Perhitungan *Tobin's Q* :

$$Tobin's Q = \frac{\text{Harga Saham} \times \text{Jumlah Saham Beredar} + \text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Keterangan:

- 1) Harga Saham adalah harga saham perusahaan selama periode waktu yang relevan..

---

(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021), 15,  
[https://etheses.iainkediri.ac.id/4535/3/931323516\\_bab2.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/4535/3/931323516_bab2.pdf).

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Susilo, M. E., -, P., & Erawati, H. (2016). Pendekatan Stakeholders Engagement dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(2), 122. <https://doi.org/10.31315/jik.v14i2.2126>

- 2) Jumlah Saham Beredar adalah total saham biasa yang beredar di pasar.
- 3) Total Utang merupakan keseluruhan kewajiban perusahaan.
- 4) Total Aset jumlah keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan.

Interpretasi nilai:

- a)  $> 1 \rightarrow$  Pasar menilai perusahaan lebih tinggi dari nilai bukunya.
- b)  $< 1 \rightarrow$  Pasar menilai perusahaan lebih rendah dari nilai bukunya.<sup>17</sup>

### **3. Faktor-faktor mempengaruhi nilai perusahaan**

Menurut Irham Fahmi (2015), nilai perusahaan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1) Faktor *Internal*

- a) Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja keuangan merupakan indikator utama untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan.

b) Struktur Modal

Struktur modal adalah ukuran penggunaan utang dan modal sendiri digunakan perusahaan untuk membiayai operasionalnya.

c) Kebijakan Dividen

Pembagian dividen yang stabil mencerminkan prospek perusahaan yang baik di mata investor.

---

<sup>17</sup> Susilo, M. E., -, P., & Erawati, H. (2016). Pendekatan Stakeholders Engagement dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(2), 122. <https://doi.org/10.31315/jik.v14i2.2126>

d) Pertumbuhan Perusahaan

Bisnis dengan prospek pertumbuhan tinggi biasanya menarik investor besar karena ada kemungkinan laba dapat meningkat nilainya seiring waktu, yang akan meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan.

e) Tata Kelola Perusahaan

Praktik tata kelola yang baik, seperti kehadiran Dewan Komisaris Independen, dapat mengurangi konflik keagenan antara pemilik dan manajer sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan. Mekanisme ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas perusahaan sehingga memberikan sinyal positif kepada investor mengenai kualitas manajemen.<sup>18</sup>

2) Faktor Eksternal

a) Kondisi Ekonomi Makro

Faktor-faktor ekonomi meliputi tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi secara umum memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas pasar modal, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

b) Kebijakan Pemerintah dan Regulasi

Kebijakan fiskal dan moneter, pajak, perizinan, serta

---

<sup>18</sup> Roszaini M. Haniffa and Mohammad Hudaib, “Corporate Governance Structure and Performance of Malaysian Listed Companies,” *Journal of Business Finance and Accounting* 33, no. 7–8 (2006): 1034–1062

peraturan lainnya akan memengaruhi iklim usaha. Regulasi yang kondusif akan mendorong kinerja perusahaan, sebaliknya, regulasi yang rumit dan tidak stabil dapat menurunkan nilai perusahaan.

c) Persaingan Industri

Persaingan yang ketat mendorong perusahaan untuk lebih efisien dan inovatif. Namun jika tidak mampu bersaing, hal ini dapat menekan laba dan menurunkan daya saing perusahaan di pasar.<sup>19</sup>

#### **G. Teori Syariah tentang Tata Kelola, Akuntabilitas dan Keadilan**

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas bisnis wajib dijalankan berdasarkan prinsip *amanah*, keadilan (*al-'adl*), dan tanggung jawab. Prinsip ini tercermin dalam konsep hisbah, yaitu mekanisme pengawasan dalam Islam yang bertujuan memastikan aktivitas ekonomi berjalan jujur, transparan, dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi pihak mana pun.<sup>20</sup> Kaitan konsep ini dengan tata kelola perusahaan modern adalah bahwa setiap pengelola perusahaan memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk mengelola sumber daya secara adil dan bertanggung jawab sesuai prinsip syariah.

Keberadaan Dewan Komisaris Independen dalam perusahaan dapat dipandang sebagai implementasi prinsip hisbah modern, yakni menjaga agar manajemen tidak menyalahgunakan wewenang dan tetap bertindak sesuai

---

<sup>19</sup> Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 75–80.

<sup>20</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Vol. 2 (New Delhi: Adam Publishers, 2000), 115

kepentingan pemilik modal. Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58 tentang kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil.<sup>21</sup> Oleh karena itu, fungsi pengawasan dalam tata kelola perusahaan tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga merupakan bagian dari nilai etika dan spiritual dalam Islam.

Dalam konteks green accounting, Islam menekankan pentingnya menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Prinsip *lā darar wa lā dirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak saling membahayakan) menjadi dasar bahwa perusahaan harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari aktivitasnya dan mengungkapkan informasi tersebut secara transparan.<sup>22</sup> Dengan demikian, nilai perusahaan dalam perspektif syariah tidak hanya dilihat dari profit atau harga saham, tetapi juga dari kemampuan perusahaan mewujudkan *maslahah* melalui tata kelola yang baik dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

## H. Hipotesis Penelitian

Sugiyono mengatakan bahwa hipotesis adalah solusi sementara untuk masalah penelitian. Disebutkan bahwa, meskipun jawaban baru-baru ini berlandaskan teori yang relevan, pernyataan tersebut belum didukung oleh bukti empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>23</sup> Ada dua jenis hipotesis yang diajukan untuk menguji hipotesis dalam penelitian, yaitu

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015), QS. An-Nisa: 58.

<sup>22</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 1996), 77.

<sup>23</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D," Bandung: Alfabeta (2016): 23-27.

Hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ). Hipotesis nol ( $H_0$ ) menyatakan bahwa tidak ada perubahan atau perbedaan yang signifikan dalam konteks yang diteliti, sedangkan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) menyatakan bahwa ada perubahan atau perbedaan yang signifikan. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| Hipotesis Nol ( $H_{01}$ )     | :Dewan Komisaris Independen tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan dalam kaitannya dengan perusahaan tercatat di ISSI periode 2020-2024. |
| Hipotesis alternatif ( $H_1$ ) | :Dewan Komisaris Independen mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di ISSI periode 2020-2024.                                   |
| Hipotesis Nol ( $H_{02}$ )     | : <i>Green accounting</i> tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di ISSI periode 2020-2024.               |
| Hipotesis alternatif ( $H_2$ ) | : <i>Green accounting</i> mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di ISSI periode 2020-2024.                     |
| Hipotesis Nol ( $H_{03}$ )     | :Dewan Komisaris Independen dan <i>Green accounting</i> tidak mempunyai pengaruh   |

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di ISSI periode 2020-2024

Hipotesis alternatif ( $H_3$ ) :Dewan Komisaris Independen dan *Green accounting* mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di ISSI periode 2020-2024